

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adi, Rianto, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.

Ali, Zainudin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djamali, R.Abdoel, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT Raja  
Grafindo Persada, Jakarta

G, Kartasasmita, 1997, *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran  
dan Prakteknya di Indonesia)*, Jakarta, LP3ES, hlm.

Hidjaz, Kamal, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem  
Pemerintah Daerah Indonesia*, Makasar, Pustaka Refleksi

HR, Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers,  
Jakarta.

Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta, PT.Raja  
Grafindo Persada.

Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media  
Group, Jakarta.

Marbun, SF, 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di  
Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Pers.

M.Hadjon, Philipus, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,  
Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Ridwan, Uniarso, 2008, *Hukum Tata Ruang*, Bandung, Nuansa.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang (Dalam Konsep Otonomi Daerah)*, Bandung, Nuansa.

Rumidi, Sukanda, 2010, *Bencana Alam dan Bencana antropogene*, Yogyakarta, Kanisius.

Santoso, Urip, 2012, *Hukum Penataan Ruang*, Surabaya, Universitas Airlangga.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

Setiawan, Yudhi, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Depok, PT Raja Grafindo Persada.

Sunarmo, Siswanto, 2005, *Hukum Pemerintah Daerah di Indoensia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

Tiasnaadmidjaja, D.A, 1997, *Pranata Pembangunan*, Bandung, Universitas Parahiayang.

Triatmodjo, Bambang, 1999, *Teknik Pantai*, Yogyakarta, Beta Offset.

W.A, Pratiko, dkk., 1997, *Perencanaan Fasilitas Pantai dan Laut*, Yogyakarta, BPFE

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Sempadan Pantai

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan  
Pulau-pulau Kecil Kecil

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang  
Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-  
pulau Kecil

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2011 Tentang  
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030

Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 Tentang  
Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada  
Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang  
Penanaman Modal

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,  
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanama  
Modal, Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang  
Pariaman

**Jurnal/Penelitian/Laporan/Skripsi/Website**

Lantang, Kisman, 2011, "*Pendapatan Petani Tambak Didesa Bega Kecamatan  
Poso Pesisir Kabupaten Poso*", Jurnal EKOMEN, Vol. 11, No. 1, 2011.

Pinto, Zulmiro, 2015, “ Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY)”, Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Vol. 3, No. 3, 2015.

Saputra, Muhammad Ilham, 2015, “*Penguasaan Tanah dan Wilayah Pesisir Pantai Di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Vol. 15, No. 1, 2015.

Setyawan, Yuli Agus, 2019, “*Persepsi Dan Partisipasi Petani Tambak Dalam Pelestarian Lingkungan Kawasan Pesisir Desa Ketawanegro Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Negeri Semarang, Semarang.

<https://minangkabaunews.com/artikel-29352-sk4-padang-pariaman-lakukan-penertiban-tambak-udang-yang-tidak-memiliki-izin.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

### **Hasil Wawancara**

Wawancara dengan Boni Andri, Kepala seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan perindustrian Kabupaten Padang Pariaman

Wawancara dengan Emri Nurman, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan  
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan perindustrian Kabupaten  
Padang Pariaman

Wawancara dengan Indra Gunawan, Staff bidang Pelayanan Perizinan dan Non  
Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan erindustrian  
Kabupaten Padang Pariaman

Wawancara dengan Suhatman, Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten  
Padang Pariaman

Wawancara dengan Rudy Repenaldi Rilis, Kepala Dinas Penanaman Modal  
Pelayanan terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman

Wawancara dengan Nova Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Padang Pariaman

Wawancara dengan Jhoni Efendi, Wakil Ketua Serikat Petambak Udang Padang  
Pariaman

Wawancara dengan Firmansyah Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP  
kabupaten Padang Pariaman

Wawancara dengan Zulfaida, Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban  
Kecamatan Batang Anai